EDISI RABU 04 NOVEMBER 2026

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02 GOVERMENTTODAY
Setelah Pajak Digital, Hashim Kembali Diluruskan soal Pajak Tukang Cukur

05 NUSANTARA
IHSG Ambruk Terendah Sejak 2020, Dana Asing Rp4,33 T Kabur

10 LISTSTYLE
Tren Kimono Jacket, Padukan dengan Outfit Modern

SADAP PRABOWO SEJAK 2025, MANTAN KAPOLRI LISTYO RESMI TERSANGKA

Ditahan Bersama Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi, Hasil Penyadapan Dihapus Oktober

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ke pusaran perkara pidana. Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Ketiganya kini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.Bareskrim menjerat ketiganya dengan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ancaman hukumannya masing-masing maksimal 10 tahun penjara untuk penyadapan ilegal, enam tahun untuk akses ilegal, dan delapan tahun untuk penghilangan informasi elektronik. Di tengah perkara tersebut, pengacara Ferdinand Hutahaean menilai penyadapan terhadap presiden patut didalami sebagai dugaan permulaan perencanaan makar. Namun, Bareskrim belum menyatakan adanya tindak pidana makar dalam konstruksi perkara yang diumumkan.Kasus ini mengingatkan pada kontroversi rekaman percakapan telepon Presiden BJ Habibie dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib pada 1999, serta terbongkarnya penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia pada 2009 yang terungkap pada 2013. Bedanya, kali ini dugaan penyadapan justru dari internal sendiri. Menyeret pejabat tinggi kepolisian yang memiliki akses terhadap sistem pemantauan komunikasi negara. Hingga kini, Polri belum mengungkap siapa penerima, pengakses, maupun pihak yang diduga memanfaatkan hasil sadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.**BERITA SELENGKAPNYA DI HAL11.....**

TIGA TERSANGKA PENYADAPAN PRABOWO

LISTYO SIGIT PRABOWO

- Jabatan terakhir: Kepala Staf Kepresidenan.
- Mantan Kapolri periode 27 Januari 2021–1 Oktober 2026.
- Pernah menjabat ajudan Presiden Joko Widodo, Kapolda Banten, dan Kabareskrim Polri.
- Total harta: **Rp15,34 miliar.** (LHKPN Periodik 2025)

AHRIE SONTA NASUTION

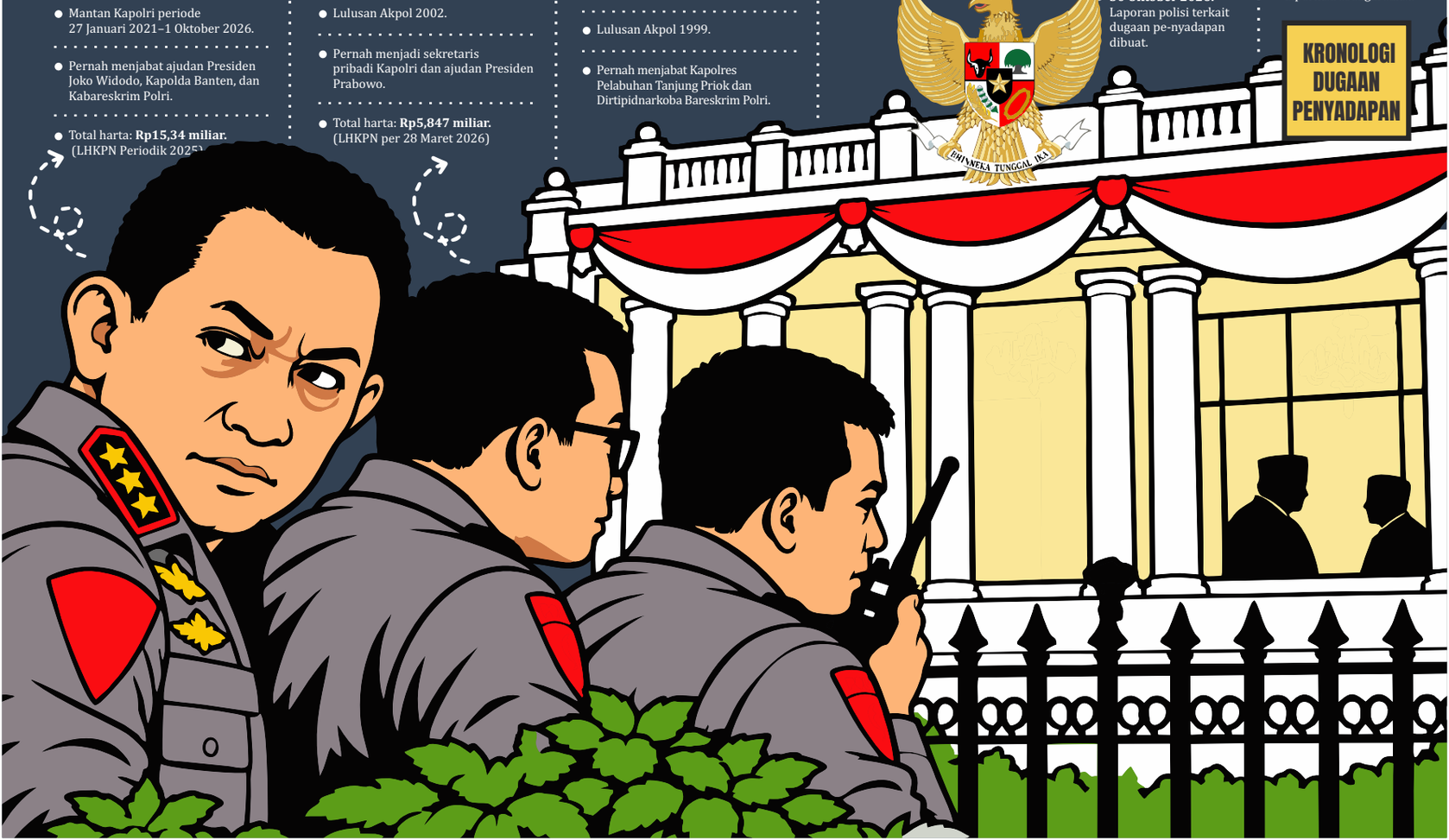
- Jabatan terakhir: Kepala Divisi Hukum Polri.
- Lulusan Akpol 2002.
- Pernah menjadi sekretaris pribadi Kapolri dan ajudan Presiden Prabowo.
- Total harta: **Rp5,847 miliar.** (LHKPN per 28 Maret 2026)

EKO HADI SANTOSO

- Jabatan terakhir: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
- Lulusan Akpol 1999.
- Pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

KRONOLOGI DUGAAN PENYADAPAN

- **2025:** Dugaan penyadapan mulai berlangsung.
- **2025–2026:** Nomor Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, dan LSM diduga disadap.
- **Oktober 2026:** File hasil sadapan dan jejak aktivitas elektronik diduga dihapus. Operasi senyap Divpropam mengamankan sejumlah perwira tinggi di Widya Chandra.
- **30 Oktober 2026:** Laporan polisi terkait dugaan pe-nyadapan dibuat.
- **3 November 2026:** Bareskrim menetapkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, yang kemudian ditahan di Rutan Mabes Polri.
- **Slamet Uliandi:** Masih diperiksa sebagai saksi.



SETELAH PAJAK DIGITAL, HASHIM KEMBALI DILURUSKAN SOAL PAJAK TUKANG CUKUR

Pemerintah kembali meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai potensi perluasan penerimaan pajak. Setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah adanya kebijakan baru yang otomatis mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transfer antarbank, kini giliran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan penjelasan mengenai pajak tukang cukur, tukang pijat, hingga pedagang warung tegal (warteg).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas omzet sampai dengan Rp500 juta setahun bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan. Bahkan, pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh 0 persen untuk batas omzet tersebut.

Dengan demikian, menurut Maman, pelaku usaha kecil seperti tukang cukur, tukang pijat, dan pedagang warteg tidak perlu khawatir dibebani PPh selama omzet tahunannya masih dalam batas fasilitas yang diberikan pemerintah.

"Saya ingin sampaikan begini, kemarin saya lihat juga statement-nya pidatonya Pak Hashim juga kayaknya ada yang dipotong," kata Maman di kantornya, Selasa (3/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyediakan insentif perpajakan bagi pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp500 juta dalam setahun. Jika dirata-ratakan, batas tersebut setara dengan omzet sekitar Rp41,6 juta per bulan.

"Sebetulnya begini, pertama saya mau sampaikan bahwa tidak ada pungutan pajak dan bahkan sudah dikeluarkan insentif pajak bagi mereka yang omzet pendapatannya satu tahun Rp500 juta. Berarti kurang lebih per bulan 40 juta tuh. Itu tidak dipungut pajak, pajaknya 0 persen," ujarnya.

Maman memastikan fasilitas tersebut berlaku secara nasional. Ia bahkan menyebut sejumlah jenis usaha yang menjadi contoh dalam pernyataan Hashim tidak perlu khawatir selama memenuhi kriteria penerima fasilitas.

"Artinya ini berlaku di semua dari Sabang sampai Merauke yang omzet pendapatannya Rp500 juta setahun. Itu tidak dipungut pajak 0 persen. Tukang pijit masuk nggak segitu? Lewat nggak dari Rp500 juta pendapatannya setahun? Nggak. Pangkas rambut? Kira-kira dapet? Nggak. Warteg? Masuk enggak? Enggak," kata Maman.

Selain fasilitas pembebasan PPh atas omzet Rp500 juta pertama bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat, Maman menjelaskan pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan skema PPh Final dengan tarif 0,5 persen sesuai ketentuan.



Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (kedua kiri) bersama Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie (kedua kanan) saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (3/11/2026). (Ist.ANT)

"Jadi maksud saya jangan juga kita salah tafsirkan. Itu dulu ya satu. Yang kedua, bagi mereka yang omzet pendapatannya per tahun Rp4,8 miliar. Rp4,8 miliar tuh gede banget loh. Per bulan itu sekitar Rp500 jutaan per bulan itu. Itu hanya dikenakan pajak 0,5 persen. Clear ya. Sudah ada insentif aturannya," ujarnya.

Maman mengatakan, pernyataan Hashim sebenarnya lebih diarahkan kepada pengusaha yang memiliki omzet jauh di atas batas usaha mikro dan kecil, tetapi diduga memanfaatkan fasilitas perpajakan UMKM dengan cara memecah badan usaha.

Ia mencontohkan pengusaha yang memiliki omzet Rp10 miliar hingga Rp20 miliar setahun. Untuk tetap menikmati fasilitas perpajakan, pengusaha tersebut diduga membagi kegiatan bisnisnya ke dalam beberapa perseroan terbatas (PT), sehingga omzet masing-masing perusahaan terlihat berada di bawah Rp4,8 miliar.

"Jadi ini sebetulnya diperuntukkan bagi teman-teman pengusaha yang memang omzetnya sudah lebih dari itu. Yang Rp10 miliar, yang Rp20 miliar," kata Maman.

Ia menduga praktik pemecahan badan usaha tersebut membuat pengusaha yang sebenarnya sudah berskala besar tetap bisa menikmati fasilitas pajak yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM.

"Tetapi mereka memecah PT. Jadi dipecah itu, Mas. Maksudnya dipecah PT, oh padahal dia satu tahun tuh sudah Rp10 miliar. Tapi dipecah sama dia tetap di bawah Rp4,8 miliar. Supaya dia menikmati insentif fasilitas yang sebetulnya bukan hak mereka. Tapi hak bagi saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori pendapatan di bawah Rp500 juta dan Rp4,8 miliar," lanjutnya.

Menurut Maman, fasilitas perpajakan tersebut seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi pelaku usaha kecil, bukan dimanfaatkan pengusaha besar untuk menekan kewajiban pajaknya.

Ia pun memastikan pemerintah tidak sedang menyiapkan kebijakan khusus untuk memajaki tukang cukur, tukang pijat, maupun pedagang warteg demi membiayai program pemerintah.

"Jadi saya mau luruskan itu ya. Jadi tidak ada sama sekali dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu clear itu, itu perintah Pak Presiden itu," tegasnya.

Polemik tersebut bermula dari pernyataan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Adik Presiden Prabowo Subianto itu menyoroti besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang belum tercatat secara resmi.

Hashim menyebut, berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 35 hingga 40 persen kegiatan ekonomi Indonesia belum masuk dalam pencatatan resmi. Ia memperkirakan nilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat tersebut mencapai sekitar Rp10.000 triliun.

"Kalau PDB kita tercatat Rp25.000 triliun, ternyata ekonomi kita jauh lebih besar. Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," kata Hashim.

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara belum tergarap maksimal. Padahal, menurutnya, kemampuan ekonomi Indonesia seharusnya jauh lebih besar apabila aktivitas ekonomi yang belum tercatat dapat masuk ke dalam sistem formal.

Untuk menggambarkan persoalan tersebut, Hashim mencontohkan transaksi jasa pangkas rambut yang biasa digunakannya. Ia mengaku memanggil tukang cukur ke apartemennya sebulan sekali dan membayar jasa tersebut tanpa kuitansi.

"Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee upah dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11 persen tidak dipungut," ujarnya.

Hashim juga menceritakan istrinya menggunakan jasa tukang pijat bernama Yanti setiap dua minggu sekali. Menurut dia, transaksi tersebut juga dilakukan tanpa kuitansi.

Selain jasa pangkas rambut dan pijat, Hashim menyinggung transaksi tunai di warung Tegal dan salon kecantikan yang menurutnya masih banyak berlangsung di luar pencatatan formal.

Ia menilai lemahnya pemungutan pajak atas aktivitas ekonomi yang belum tercatat menjadi salah satu penyebab penerimaan negara belum optimal.

"Seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita seharusnya G12, tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat, tidak dipungut. Maka kita lemah," ujarnya.

Pernyataan Hashim tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai batas antara upaya memperluas basis pajak dan potensi bertambahnya beban masyarakat kecil. Terlebih, contoh yang digunakan berkaitan dengan transaksi jasa sehari-hari yang selama ini identik dengan usaha mikro dan pekerja informal. (gus,ist,owr,kum/dya)

TERSERET PESTA NARKOBA, GERINDRA PECAT 3 ANGGOTA DPRD DI JATIM

Sebut Mutasi 7 Polisi terkait Dugaan Pemerasan

Partai Gerindra akhirnya memecat tiga kadernya yang terseret kasus dugaan pesta narkoba di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur. Keputusan Mahkamah Partai yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026 itu sekaligus menjadi jalan bagi proses Penggantian Antarwaktu (PAW) terhadap ketiganya dari kursi DPRD di daerah masing-masing. Di tengah keputusan pemecatan tersebut, muncul dugaan permintaan uang hingga Rp300 juta oleh oknum kepolisian kepada tiga legislator yang ditangkap. Dugaan itu mencuat setelah 7 anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang melakukan penggerebekan justru dimutasi. Mereka kini menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur, Kharisma Febriansyah, membantah mutasi tujuh polisi tersebut merupakan akibat intervensi partainya. Sebaliknya, ia menduga pemindahan personel berkaitan dengan adanya permintaan uang dalam penanganan perkara tiga kader Gerindra tersebut.

"Memang ada hal yang disampaikan di dalam statement beliau (Habiburokhman) tersebut, yaitu adanya lobi-lobi untuk masalah uang. Jadi bukan karena Gerindra terus [7 anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya] dimutasi. Memang ada tindakan yang kita dengar adalah ada sejumlah uang yang diminta," kata Kharisma, Selasa (3/11/2026).

Kharisma menyebut nominal uang yang diduga diminta berkisar Rp100 juta hingga Rp300 juta. Angka Rp300 juta itu merupakan dugaan total permintaan terhadap tiga anggota DPRD, bukan masing-masing orang. Ia juga menduga uang tersebut belum sempat diserahkan kepada aparat kepolisian.

"[Nominal uang yang diduga diminta petugas kepolisian sebesar] Rp300 juta, itu tiga orang [kader Gerindra yang ditangkap usai pesta narkoba] ya," ujarnya.

Kharisma meminta dugaan tersebut ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian. Menurut dia, persoalan dugaan permintaan uang merupakan ranah internal Korps Bhayangkara dan berada di luar kewenangan partai.

Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebelumnya juga mengungkap dugaan permintaan uang oleh aparat. Namun, nominal yang disebutkannya berbeda. Ia menyampaikan informasi awal mengenai permintaan sekitar Rp50 juta atau sejumlah uang yang belum dipastikan jumlahnya.

"Kalau enggak salah Rp50 juta atau berapa begitu kan ya, minta uang. Tentu hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).



(Ilustrasi) DPD Gerindra Jatim akan PAW tiga kader DPRD terlibat narkoba. (Dok)

Habiburokhman menegaskan tidak pernah melakukan komunikasi ataupun intervensi terhadap Polrestabes Surabaya sejak penangkapan tiga kader Gerindra tersebut. Ia juga menyatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan.

Sementara itu, Kharisma menegaskan Gerindra tidak menoleransi penyalahgunaan narkoba oleh kadernya. Partai, kata dia, akan memproses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap ketiga anggota DPRD tersebut. Adapun status keanggotaan mereka di partai masih akan dievaluasi dengan mempertimbangkan itikad untuk memperbaiki diri.

"Di Gerindra tidak ada toleransi untuk narkoba, itu betul-betul merusak. Ya, wong waras (orang sehat) aja belum tentu bisa ngurusin negoro, apalagi wong (orang) kena narkoba," ujar Kharisma.

Ia menambahkan, "Ya sebagai kader ya jelas kita juga akan urus, nanti ditindaklanjuti, yang jelas di-PAW dulu. Nanti kita lihat dulu apakah memang ada itikad baik untuk berbenah."

Sebelumnya, Habiburokhman juga menyatakan Mahkamah Partai Gerindra telah memutuskan pemberhentian ketiganya dari jabatan sebagai anggota DPRD Fraksi Gerindra dalam sidang pada 8 Oktober 2026. Keputusan tersebut menjadi dasar partai untuk memproses PAW

Diperiksa Bidpropam Polda Jatim

Di sisi lain, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan tujuh anggota Satresnarkoba yang dimutasi masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Bidpropam Polda Jatim.

"Masih dalam pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim, apabila ada update akan disampaikan lebih lanjut," kata Hadi.

Diketahui, mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menjadi sorotan karena waktunya berdekatan dengan penanganan kasus narkoba yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh personel itu sebelumnya terlibat dalam penggerebekan di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin dini hari, 28 September 2026.

Perpindahan tugas mereka tertuang dalam Surat Telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Artinya, mutasi diterbitkan sekitar 25 hari setelah penggerebekan tersebut.

Tiga personel dari kalangan perwira mengalami perubahan jabatan. Iptu Kevin Asshabul Kahfi, yang sebelumnya menjabat Kanit 1 Satresnarkoba, dipindahkan menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho, sebelumnya Kasubnit 1 Unit 1, dialihkan menjadi Pelaksana Sementara (Ps) Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.

Sementara itu, Ipda Andri Kiki yang sebelumnya menjabat Kasubnit Satresnarkoba kini bertugas sebagai Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.

Empat personel lainnya berasal dari jajaran bintara. Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso dipindahkan ke Polsek Tegalsari. Aipda Rico Pramana mendapat penugasan di Polsek Tambaksari, sedangkan Bripka Rangga Pinileh dipindahkan ke Polsek Genteng.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan membenarkan mutasi tersebut.

Namun, ia menyebut kebijakan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan tugas.

"Terkait mutasi terhadap tujuh anggota Satresnarkoba hal tersebut karena dugaan pelanggaran SOP dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh Bid Propam Polda Jatim," kata Luthfie, sebagaimana diberitakan detikJatim pada 3 November 2026.

Luthfie juga menjelaskan bahwa mutasi personel merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan kebutuhan penugasan yang dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian.

"Perlu kami jelaskan bahwa kebijakan mutasi personel merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan kebutuhan penugasan yang dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian," ujarnya.(gus,kum,ist,dtc/dya)

Perbadingan Kendaraan dalam LHKPN



Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM)

Anggota DPRD Kabupaten Malang

- Harta **Rp1,115 miliar**
- Tanggal pelaporan LHKPN: **14 Maret 2026.**
- Total harta kekayaan: **Rp1.115.000.000.**
- Total nilai empat kendaraan: **Rp415 juta.**



Asrila Diska Rimunda (ARR)

Anggota DPRD Banyuwangi sekaligus Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi

- Harta **Rp521 juta**
- Tanggal pelaporan LHKPN: **28 Maret 2026.**
- Total harta kekayaan: **Rp521.000.000.**
- Total nilai kendaraan: **Rp275 juta.**



Afif Reza Rimunda (ADR)

Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

- Harta minus **Rp116,3 juta**
- Total utang: **sekitar Rp451 juta.**
- Total nilai kendaraan: **Rp315 juta.**

HARIAN LENTERA TODAY
Inspirasi Perubahan

BERAS MASIH MAHAL: TEMBUS RP15.765/KG, PEDAGANG PILIH BUNGKAM

Gonjang-ganjing harga beras belum mereda. Di tengah kenaikan harga sejumlah jenis beras dan sorotan terhadap dugaan pengoplosan beras subsidi, belasan pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, memilih bungkam ketika dimintai keterangan mengenai fluktuasi harga beras pada Selasa (3/11/2026). Situasi ini terjadi ketika data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia menunjukkan harga beras di tingkat eceran masih berada pada rentang Rp14.800 hingga Rp18.050 per kilogram, bergantung pada kualitasnya.

PERGERAKAN HARGA BERAS
(3 November)

Kualitas Medium I
Rp 16.450

Kualitas Medium II
Rp 16.350

Kualitas Super I (Premium)
Rp 17.800

Kualitas Super II (Premium)
Rp 17.300

Kualitas Bawah I
Rp 14.900

Kualitas Bawah II
Rp 14.450

Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)



(Ilustrasi) Harga beras di tingkat eceran masih berada pada rentang Rp14.800 hingga Rp18.050 per kilogram.dok

Pada Oktober 2026 yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp15.765 per kilogram. Sementara, data PIHPS yang dilansir pada pukul 07.15 WIB, Selasa, mencatat beras kualitas bawah I seharga Rp14.900 per kilogram dan bawah II Rp14.800 per kilogram. Beras medium I berada di level Rp16.700, sedangkan medium II Rp16.500 per kilogram. Untuk kualitas super, harga super I mencapai Rp18.050 dan super II Rp17.500 per kilogram.

Untuk diketahui, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium di zona 1, Rp14.000 di zona 2, dan Rp15.500 di zona 3.

Di luar beras, PIHPS pada pukul 07.15 WIB juga mencatat harga cabai rawit merah Rp93.650 per kilogram, bawang merah Rp37.200, dan bawang putih Rp38.550. Harga daging ayam ras segar tercatat Rp39.000 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp153.350 per kilogram. Data ini memperlihatkan tekanan harga tidak hanya terjadi pada komoditas beras.

Persoalan harga beras kini berkelindan dengan pengusutan dugaan penyalahgunaan beras subsidi. Pada hari yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut praktik pengoplosan sekitar 600 ton beras SPHP berpotensi menyebabkan subsidi pemerintah sebesar Rp3,3 miliar tidak sampai kepada masyarakat sasaran.

Angka tersebut dihitung berdasarkan subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume 600 ton atau 600 ribu kilogram, nilai subsidi yang berpotensi tidak tersalurkan mencapai sekitar Rp3,306 miliar. Perhitungan ini merupakan estimasi nilai subsidi yang tidak dinikmati penerima manfaat, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit.

Modus yang diduga dilakukan pelaku adalah membongkar beras SPHP, kemudian mengolah atau mengemas ulang dan memasarkannya sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Amran menyebut beras subsidi yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dipasarkan kembali dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.

"Kerugian ini muncul akibat subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat sasaran," kata Amran, sebagaimana dikutip, Selasa (3/11/2026).

Kasus tersebut bermula dari inspeksi mendadak Amran di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu (28/10/2026). Dalam sidak itu, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras SPHP yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan harga terjangkau.

"Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Kita jual hanya Rp12.500, dibongkar kemudian dijual Rp17.000 ke pasar," ujar Amran saat sidak.

Ia juga mengecam dugaan praktik tersebut karena beras SPHP merupakan program pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini," katanya.

Amran menyebut temuan awal barang bukti mencapai sekitar 600 ton. Namun, ia menduga jumlah beras yang telah disalahgunakan bisa lebih besar dan mencapai ribuan ton. Dugaan tersebut masih perlu ditelusuri aparat penegak hukum melalui pemeriksaan alur distribusi, asal beras, serta pihak-pihak yang terlibat.

Setelah mendatangi lokasi di Kayumanis, Amran bersama jajaran kepolisian melanjutkan sidak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan praktik serupa di salah satu pusat perdagangan beras terbesar di Jakarta.

Amran menyebut dugaan pengoplosan tersebut tidak berdiri sendiri dan meminta aparat mengusut jaringan yang terlibat. Namun, dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Pengusutan kasus tersebut juga berlanjut ke lingkungan lembaga pemerintah. Pada Kamis (29/10/2026), Amran menyatakan telah mengevaluasi 10 pejabat dari Perum Bulog dan Bapanas. Dari jumlah itu, delapan pejabat dicopot dari jabatannya, sedangkan dua lainnya mendapat peringatan.

"(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Amran.

Selain evaluasi internal, sembilan orang dari pihak swasta disebut diproses secara hukum. Dari jumlah tersebut, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status hukum tersebut perlu dibedakan dari pencopotan pejabat yang merupakan langkah administratif. Kesalahan pidana masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.

"Sebagai informasi yang biasa saya juga sampaikan, harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," kata Ateng dalam konferensi pers BPS, Senin (2/11/2026).

Di tingkat penggilingan, harga beras naik 0,26 persen secara bulanan dan 6,89 persen secara tahunan. Kenaikan terjadi pada beras premium maupun medium. Harga beras premium naik 0,01 persen secara bulanan dan 11,32 persen secara tahunan. Sementara itu, beras medium meningkat 0,35 persen secara bulanan dan 5,57 persen secara tahunan.

Pada tingkat grosir, harga beras naik 0,01 persen secara bulanan dan 5,13 persen secara tahunan. Adapun di tingkat eceran, kenaikannya mencapai 0,08 persen secara bulanan dan 4,10 persen secara tahunan.(tin,ist,kum/dya)

IHSG AMBRUK TERENDAH SEJAK 2020, DANA ASING RP4,33 T KABUR

Indeks Merosot ke 4.904, Penjualan Bersih Investor Luar Negeri Rp759,98 M

Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan hebat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ambrol 3,78 persen ke level 4.904,28 pada perdagangan Selasa (3/11/2026). Posisi ini menjadi yang terendah sejak Oktober 2020. Di tengah kejatuhan tersebut, investor asing kabur alias melepas saham senilai Rp4,33 triliun, dengan nilai pembelian hanya Rp3,57 triliun. Alhasil, terjadi jual bersih atau net foreign sell sebesar Rp759,98 miliar.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG kehilangan 192,54 poin dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Padahal, indeks sempat dibuka menguat di level 5.126,53 dan menyentuh posisi tertinggi 5.143,58. Namun, tekanan jual yang terus meningkat membuat IHSG berbalik arah hingga menyentuh titik terendah 4.895 sebelum akhirnya ditutup di level 4.904,28.

Tekanan tersebut terjadi hampir merata di seluruh pasar. Sebanyak 624 saham berakhir di zona merah, hanya 57 saham menguat, dan 37 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp11,43 triliun dengan volume 24,72 miliar saham dan frekuensi transaksi sekitar 1,38 juta kali.

Pelemahan juga terjadi pada indeks saham unggulan. Sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps menjadi sasaran aksi jual, termasuk saham-saham perbankan dan emiten badan usaha milik negara (BUMN).

Berdasarkan data yang dihimpun, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menjadi yang paling banyak dilepas investor asing dengan nilai jual bersih Rp310 miliar. Berikutnya PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar Rp94 miliar, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Rp64 miliar, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp62 miliar, dan PT Timah Tbk (TINS) Rp34 miliar.

Di tengah derasnya aksi jual, beberapa saham masih mencatatkan pembelian bersih asing. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan net buy Rp74 miliar, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Rp48 miliar, PT Astra International Tbk (ASII) Rp46 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp40 miliar, serta PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) Rp36 miliar.

Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual menilai pelemahan IHSG masih dipengaruhi sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan tingginya harga minyak dunia.

"Masih sama, terkait MSCI shock dan tingginya harga minyak," kata David.

Menurut dia, aksi jual bersih investor asing yang masih tinggi turut membebani pergerakan pasar saham. Pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian karena dapat meningkatkan kekhawatiran investor terhadap prospek aset keuangan domestik.



Rekaman layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta yang memerah karena mengalami penurunan. (Dok)

"Betul, net sell asing karena isu MSCI [masih tinggi]," ujarnya.

MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang menjadi salah satu acuan investasi bagi manajer investasi dan investor institusi internasional. Perubahan komposisi maupun bobot saham Indonesia dalam indeks tersebut berpotensi memengaruhi alokasi investasi asing di pasar domestik.

Pelaku pasar kini mencermati MSCI Index Review pada 11-12 November 2026. Ketidakpastian terkait transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, serta porsi saham yang tersedia bagi investor asing menjadi sejumlah persoalan yang diperhatikan.

Jika bobot saham Indonesia mengalami penyesuaian, manajer investasi yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan berpotensi melakukan penataan ulang portofolio. Situasi inilah yang ikut mendorong investor mengambil posisi lebih berhati-hati menjelang pengumuman evaluasi.

Selain MSCI, harga minyak dunia juga menjadi perhatian. Pada Senin (2/11), harga minyak Brent sempat turun 7,63 persen ke 104,77 dolar AS per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi 7,36 persen ke 96,46 dolar AS per barel. Penurunan terjadi setelah muncul harapan negosiasi damai Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Qatar.

Namun, harga minyak kembali bergerak naik ke sekitar 105 dolar AS per barel pada Selasa setelah muncul laporan serangan Amerika Serikat di Pulau Qeshm, Iran.

Menkeu Akui Tekanan Ekonomi Meningkat

Kejatuhan IHSG terjadi ketika pemerintah mengakui tekanan terhadap perekonomian domestik mulai meningkat sejak Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kondisi ekonomi Indonesia selama kuartal III-2026 memang masih relatif terjaga. Namun, perkembangan global dan domestik belakangan mulai memberikan tekanan lebih besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11).

"Ketahanan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan intermediasi keuangan terjaga. Namun tekanan meningkat memasuki Oktober," kata Suahasil.

Menurut dia, eskalasi konflik geopolitik telah mendorong kenaikan harga energi di tingkat global. Pada saat bersamaan, kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara semakin ketat sehingga likuiditas di pasar keuangan dunia ikut mengetat.

Dampaknya juga dirasakan pasar keuangan domestik. Suahasil menyebut sentimen MSCI dan tekanan nilai tukar turut memperbesar arus keluar dana dari pasar saham Indonesia.

"Ketatnya likuiditas. MSCI juga mewarnai ekonomi kita dan tekanan nilai tukar meningkatkan arus keluar dari pasar saham," paparnya.

KSSK juga mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 menjadi 5,4-5,5 persen secara tahunan. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Agustus 2026 yang berada di kisaran 5,6-6,0 persen.

Meski demikian, pemerintah masih melihat sejumlah penopang pertumbuhan. Permintaan domestik dan ekspor diperkirakan tetap berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Konsumsi rumah tangga juga ditopang berbagai stimulus fiskal, sementara investasi diharapkan tumbuh melalui proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tetap menyampaikan optimisme terhadap fundamental ekonomi Indonesia.(tin,ist,ktn,kum/dya)

Pergerakan IHSG 10 Hari Terakhir

03 Nov 2026	4.904,29 (-3,78%)
02 Nov 2026	5.096,83 (+0,79%)
30 Okt 2026	5.057,05 (-0,80%)
29 Okt 2026	5.098,06 (-3,49%)
28 Okt 2026	5.282,31 (+0,31%)
27 Okt 2026	5.266,13 (-1,99%)
26 Okt 2026	5.373,09 (-1,22%)
23 Okt 2026	5.439,26 (+0,95%)
22 Okt 2026	5.387,90 (+1,12%)
21 Okt 2026	5.328,36 (+0,94%)

Nilai Penutupan

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

DPRD Sebut Pembangunan RS di Malang Selatan Butuh Rp500 M

MALANG- Pembangunan rumah sakit di wilayah Malang Selatan diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp500 miliar. Estimasi tersebut disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang seiring rencana pengusulan pembangunan rumah sakit tipe C kepada pemerintah pusat.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pengadaan alat dan perlengkapan penunjang pelayanan kesehatan.

"Kalau dalam anggaran terdekat ini, berarti bisa saja itu masuk di 2027. Kalau estimasi anggaran sekitar Rp400 sampai Rp500 miliar, karena di situ butuh alat-alat dan perlengkapan kesehatan yang lain," ujar Zia, dikutip Selasa (3/11/2026).

Rencana pembangunan rumah sakit tersebut akan dibawa Komisi IV DPRD Kabupaten Malang pada agenda kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam waktu dekat ini.

Dalam usulan itu, kata Zia, legislatif akan mengawal agar pemerintah pusat dapat menanggung pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyiapkan lahan.

Dijelaskannya, Pemkab Malang memiliki aset tanah di sejumlah wilayah Malang Selatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 20–25 hektare.

"Kalau rumah sakit kan harus besar, artinya butuh sekitar 20 sampai 25 hektare. Di wilayah Malang Selatan kita punya untuk tanah yang asetnya pemerintah Kabupaten Malang. Jadi nanti kami bawa aspirasi itu ke Bappenas," katanya.

Sejumlah kecamatan masuk dalam alternatif lokasi pembangunan, yakni Bantur, Sumbermanjing Wetan, Dampit, Tirtoyudo, dan Ampelgading. Meski demikian, lanjutnya, hingga kini belum ada lokasi yang ditetapkan secara pasti.

Menurut Zia, pembangunan rumah sakit baru diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang yang memiliki wilayah cukup luas. Selama ini, masyarakat di sejumlah kawasan Malang Selatan harus menempuh perjalanan sekitar 2,5 hingga 3 jam untuk mencapai RSUD Kanjuruhan di Kepanjen.



Ilustrasi: Bangunan RSUD Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. (foto: ist)

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan, terutama ketika masyarakat membutuhkan penanganan medis dalam situasi darurat. Karena itu, keberadaan rumah sakit di kawasan selatan diharapkan dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Usulan ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga 2,5–3 jam untuk mendapatkan layanan medis di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, terutama dalam kondisi darurat," jelasnya.(Santi/Dya)

Pemkot Malang Bakal Libatkan Swasta untuk Tekan Emisi Gas Rumah Kaca


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang. (Santi/Lentera)

MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menjajaki keterlibatan perusahaan dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) di wilayah setempat. Melalui skema tersebut, sektor swasta diharapkan turut memberikan dukungan pendanaan bagi kegiatan pengendalian emisi yang dilakukan pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat.

"Pelibatan perusahaan ini menjadi salah satu skema yang tengah kami sosialisasikan. Nanti harapannya perusahaan-perusahaan besar itu dapat memberikan subsidi kepada Pemkot Malang ataupun dukungan pendanaan langsung untuk kegiatan pengendalian GRK yang dilaksanakan kelompok masyarakat," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, Selasa (3/11/2026).

Salah satu sektor usaha yang menjadi perhatiannya adalah perusahaan produsen air minum dalam kemasan (AMDK). Hal ini mempertimbangkan tingginya konsumsi produk tersebut di kalangan masyarakat Kota Malang.

Dalam skema tersebut, Raymond mengatakan perusahaan dapat memberikan dukungan pendanaan, sementara Pemkot Malang menyiapkan sejumlah lokasi untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian emisi.

Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain penanaman pohon dan pembuatan instalasi hidroponik di lingkungan permukiman.

Dijelaskannya, upaya pengendalian GRK perlu melibatkan masyarakat secara langsung dan dimulai dari lingkup terkecil, mulai dari rumah tangga, RT/RW hingga kelurahan. Sehingga upaya pengurangan emisi tidak hanya bergantung pada program pemerintah daerah.

"Karena kondisi saat ini perlu penanganan yang dimulai dari rumah tangga, tiap warga di RT/RW, kelurahan tanpa harus menunggu dari pemerintah daerah," katanya.

Selain penanaman pohon dan hidroponik, Raymond menyebut, pihaknya juga tengah menyosialisasikan pembuatan lubang resapan biopori sebagai bagian dari upaya pengendalian GRK di lingkungan masyarakat. "Kami berupaya mengadaptasi program dari pemerintah pusat agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan di tingkat lokal," imbuhnya.

Pengendalian emisi juga diarahkan melalui pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R). Upaya ini bertujuan agar penanganan sampah tidak hanya terpusat di hilir atau TPA, tetapi juga dilakukan sejak dari sumbernya.

"Harapannya sampah tidak hanya tertangani di hilir atau di TPA, tetapi sudah dilaksanakan di hulu. Dengan adanya pengolahan sampah di situ akan meminimalisir penyebab GRK," katanta.

Di sektor pengelolaan sampah, DLH Kota Malang memastikan penerapan metode sanitary landfill di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, bukan open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi gas rumah kaca, terutama gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah.(Santi/Dya)

SAUDI-HOUTHI MEMANAS, PIALA ASIA MUNDUR SETAHUN

Turnamen sepak bola terbesar Asia mundur hampir setahun akibat situasi keamanan Timur Tengah. Arab Saudi tetap menjadi tuan rumah, sementara Indonesia, Jepang, dan Australia harus menyesuaikan persiapan menghadapi perubahan kalender kompetisi.

Ketegangan Arab Saudi dengan kelompok milisi Houthi di Yaman mulai berdampak pada agenda olahraga internasional. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) akhirnya menunda Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Turnamen tersebut kini dijadwalkan berlangsung pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Keputusan itu diambil menyusul meningkatnya ancaman keamanan di kawasan Timur Tengah, termasuk serangan kelompok Houthi terhadap sejumlah wilayah Arab Saudi. Bandara internasional di Riyadh menjadi salah satu sasaran serangan. Reuters melaporkan serangan tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Selain Riyadh, peluncuran drone ke arah Dammam juga dilaporkan menambah kekhawatiran terhadap keamanan wilayah Saudi.

Situasi tersebut membuat penyelenggaraan turnamen yang melibatkan 24 negara menjadi semakin berisiko. Bukan hanya keamanan pemain dan ofisial, perjalanan tim, penonton, serta kelancaran logistik pertandingan turut menjadi persoalan. AFC akhirnya memilih menggeser jadwal hampir 11 bulan setelah melakukan pembahasan dengan Komite Penyelenggara Lokal (LOC) dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam pernyataan resminya, Selasa (3/11/2026), AFC menyebut keputusan penjadwalan ulang diambil karena keadaan luar biasa akibat perkembangan situasi kawasan, termasuk kompleksitas logistik dan gangguan perjalanan.

"Keadaan luar biasa telah tercipta bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi sesuai jadwal semula, sehingga penundaan ini diperlukan demi kepentingan semua tim peserta, ofisial, penonton, dan pemangku kepentingan lainnya," demikian pernyataan AFC.

AFC menyatakan akan bekerja sama dengan LOC, asosiasi sepak bola negara peserta, sponsor, mitra penyiaran, dan mitra komersial untuk memastikan turnamen tetap berlangsung. Jadwal baru tersebut selanjutnya akan diajukan kepada FIFA untuk mendapatkan persetujuan.



Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengumumkan jadwal terbaru Piala Asia 2027 ke bulan Desember.(dok.ist)

Kenapa Tidak Ganti Tuan Rumah?

Keputusan penundaan turut memancing reaksi suporter, termasuk di Indonesia. Sejumlah warganet mengungkapkan kekecewaan karena harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan Timnas Indonesia tampil di kompetisi tertinggi sepak bola Asia.

"Udah nunggu 2 bulan jadinya nunggu satu tahun," tulis salah satu akun yang dikutip.

Warganet lainnya mempertanyakan keputusan AFC yang tidak memindahkan lokasi penyelenggaraan ke negara lain.

"Pindah aja tuan rumahnya, lagian banyak tuh negara Asia siap jadi tuan rumah seperti China, Jepang, Korsel dan Australia," tulis seorang suporter.

Meski begitu, ada pula yang melihat tambahan waktu sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat persiapan.

"Keuntungan buat timnas kita," tulis warganet lainnya.

Piala Asia 2027 merupakan edisi ke-19 turnamen sepak bola antarnegara Asia. Kompetisi ini akan diikuti 24 negara dengan total 51 pertandingan di delapan stadion yang tersebar di Riyadh, Jeddah, dan Al-Khobar.

Keputusan menunda Piala Asia 2027 memunculkan pertanyaan mengapa AFC tidak sekaligus memindahkan lokasi penyelenggaraan ke negara lain. Sejumlah negara seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Australia dinilai memiliki infrastruktur untuk menggelar turnamen sepak bola berskala kontinental tersebut.

Namun, memindahkan tuan rumah bukan perkara mudah. Arab Saudi telah memperoleh hak penyelenggaraan dan menyiapkan infrastruktur untuk turnamen tersebut. Penyelenggaraan Piala Asia juga menjadi bagian dari ambisi negara itu mengembangkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nonmigas melalui program Visi 2030.

Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede atau Bung Harpa menilai kemungkinan pemindahan tuan rumah relatif kecil karena Arab Saudi tentu keberatan kehilangan hak penyelenggaraan.

"Ya kenapa (harus ditunda kurang lebih satu tahun-red)? Karena seperti yang sempat disinggung juga, untuk memindahkan venue rasa-rasanya ini kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena Arab Saudi juga pasti keberatan," kata Harpa, Selasa (3/11/2026).

Menurut dia, persiapan negara pengganti juga menjadi persoalan. Waktu yang tersedia terlalu singkat untuk menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan kompetisi sebesar Piala Asia.

"Ya mereka punya hak untuk menyelenggarakan turnamen bergengsi ini, sekaligus juga menjadi sequence dari Visi 2030 Arab Saudi yang ingin meningkatkan sektor pariwisata mereka dari non-migas, sehingga memang kalau untuk geser tempat enggak, tapi geser waktu lebih memungkinkan," ujarnya.

"Pun kalau geser tempat agak sulit karena dalam waktu yang singkat, bahkan Jepang sekalipun belum tentu sanggup untuk menyelenggarakan Piala Asia," tambahnya.

Pertimbangan lainnya adalah cuaca. Menggelar turnamen pada pertengahan 2027 juga bukan pilihan ideal karena suhu di kawasan Timur Tengah dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celsius.

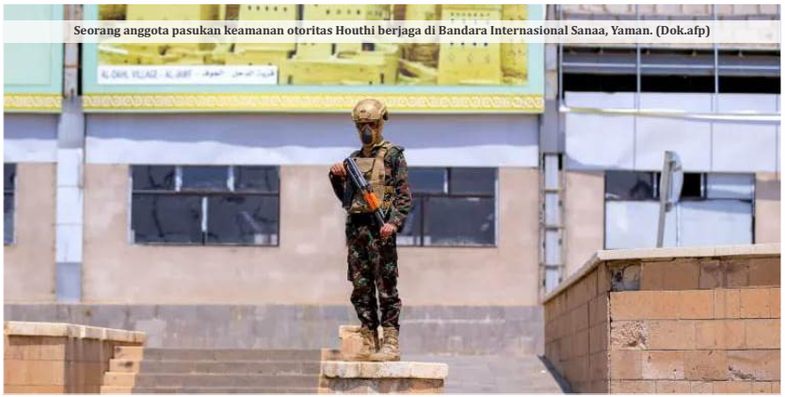
"Dan kalau diselenggarakan di tengah tahun, maka ini juga lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena di Timur Tengah literally suasananya atau iklimnya panas. Jadi bukan hanya panas soal geopolitik, ya, tapi temperatur riilnya sangat luar biasa panas, bisa 40 derajat lebih Celcius," paparnya.

Perubahan jadwal Piala Asia 2027 turut memengaruhi persiapan negara-negara peserta. Indonesia, Jepang, dan Australia menjadi tiga tim yang perlu menyesuaikan agenda masing-masing, baik dari sisi persiapan skuad maupun kepelatihan.

Bagi Timnas Indonesia, penundaan ini memberikan waktu lebih panjang untuk mematangkan skuad asuhan John Herdman. Indonesia tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

Sejak ditangani Herdman pada 3 Januari 2026, Indonesia telah menjalani 12 pertandingan dengan catatan delapan kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan. Skuad Garuda mencetak 34 gol dan kebobolan 12 gol. Herdman juga berhasil membawa Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Tambahan waktu hampir setahun dapat dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi permainan, menguji komposisi pemain, dan meningkatkan kualitas persaingan di dalam skuad. Pemain yang tengah menjalani pemulihan cedera, seperti Jay Idzes, juga memiliki waktu lebih panjang untuk kembali ke performa terbaik. Sementara Calvin Verdonk dapat memanfaatkan periode tersebut untuk memperjuangkan posisi di klubnya, Lille. (gus,rtr,ist/dya)


Seorang anggota pasukan keamanan otoritas Houthi berjaga di Bandara Internasional Sanaa, Yaman. (Dok.afp)

HARIAN LENTERA



Simak Strategi Fueling agar Pelari Tak Kehabisan Tenaga saat Race

Sudah berlatih selama berbulan-bulan untuk mengikuti lomba lari, tetapi tenaga justru mendadak habis di tengah perlombaan? Kondisi ini dikenal sebagai bonking atau hitting the wall. Fenomena tersebut kerap menjadi tantangan bagi pelari jarak jauh, terutama peserta Half Marathon (21 kilometer) dan Full Marathon (42 kilometer).

Bonking merupakan kondisi ketika cadangan glikogen di otot dan hati menipis sehingga tubuh kesulitan mempertahankan pasokan energi untuk berlari. Dampaknya bisa berupa penurunan tenaga secara drastis, kaki terasa sangat berat, kecepatan melambat, hingga pusing. Kondisi ini membuat pelari kesulitan mempertahankan ritme meskipun sudah mempersiapkan latihan fisik dalam waktu lama.

Salah satu strategi untuk mengurangi risiko tersebut adalah menerapkan fueling atau pemenuhan energi secara terencana. Strategi ini mencakup pengaturan asupan karbohidrat sebelum dan selama perlombaan, termasuk kecukupan cairan dan elektrolit.

Dokter spesialis gizi klinik dr. Igus Ulfa Yaze, SpGK, mengingatkan pentingnya mempersiapkan asupan energi sejak sebelum perlombaan. Menurut dia, pelari jarak jauh perlu memperhatikan pemenuhan karbohidrat beberapa hari sebelum race, bukan hanya mengandalkan makanan sesaat sebelum start."Untuk pelari 21K dan 42K, kunci utamanya ada di pre-race. Maksimalkan karbohidrat 2 sampai 3 hari sebelumnya, dan 2 jam sebelum start," kata dr. Yaze.

Carbo Loading, Isi Cadangan Energi

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah carbo loading, yakni meningkatkan asupan karbohidrat selama dua hingga tiga hari menjelang perlombaan. Tujuannya mengoptimalkan simpanan glikogen di otot dan hati sebagai sumber energi ketika tubuh melakukan aktivitas fisik berdurasi panjang.

Penjelasan serupa disampaikan Sai Krupa Das, ilmuwan senior di USDA Human Nutrition Research Center on Aging, Tufts University, Amerika Serikat. Dalam wawancara yang dipublikasikan Tufts Now pada 2 April 2026, Das menjelaskan bahwa otot bergantung pada simpanan karbohidrat dalam bentuk glikogen untuk menjalankan aktivitas ketahanan seperti marathon.

"Metode carb loading atau asupan karbohidrat tinggi populer karena otot Anda bergantung pada cadangan karbohidrat, yang tersimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen menyediakan bahan bakar untuk latihan ketahanan, seperti maraton," ujar Das.

Mengacu pada rekomendasi American College of Sports Medicine (ACSM) yang dijelaskannya, kebutuhan karbohidrat untuk strategi carbo loading dapat mencapai 10–12 gram per kilogram berat badan selama 36–48 jam sebelum perlombaan.

Namun, jumlah tersebut merupakan panduan untuk persiapan lomba ketahanan dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing pelari.

Das juga menyarankan konsumsi makanan sumber karbohidrat sederhana seperti nasi atau pasta tanpa tambahan saus berlemak berlebihan selama tiga hari menjelang marathon. Jenis makanan tersebut relatif lebih mudah dicerna dan membantu memenuhi kebutuhan energi.

Perhatikan Makanan 2 Jam Sebelum Start

Selain carbo loading, waktu makan sebelum perlombaan juga perlu diperhatikan. Sekitar dua jam sebelum start, pelari disarankan mengonsumsi makanan sumber karbohidrat yang relatif rendah serat dan mudah dicerna.

Tujuannya memenuhi kebutuhan energi tanpa membebani sistem pencernaan ketika tubuh mulai berlari. Pilihan makanan dapat disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing, misalnya roti, pisang, oatmeal, atau sumber karbohidrat lain yang sudah biasa dikonsumsi saat latihan.

Ahli diet olahraga Alex Larson, RD, yang bekerja dengan atlet ketahanan, memberikan penjelasan serupa kepada Runner's World dalam artikel panduan nutrisi marathon

Larson menyarankan pelari mengonsumsi sekitar 1–4 gram karbohidrat per kilogram berat badan dalam rentang dua hingga empat jam sebelum start. Jumlahnya dapat disesuaikan dengan waktu makan dan kemampuan tubuh mencerna makanan.

Menurut Larson, persediaan energi yang cukup sejak sebelum perlombaan membantu pelari mempertahankan tenaga, terutama ketika memasuki 10 kilometer terakhir."Hal itu benar-benar akan membekali Anda dengan energi yang prima di bagian akhir maraton, karena biasanya stamina justru akan anjlok drastis pada 10 km terakhir," kata Larson.

Jangan Menunggu Kehabisan Energi

Fueling tidak berhenti ketika pelari sudah berada di garis start. Dalam perlombaan jarak jauh, kebutuhan karbohidrat perlu dipenuhi secara berkala untuk membantu mempertahankan ketersediaan energi.

Sai Krupa Das dari Tufts University menyarankan asupan sekitar 30–60 gram karbohidrat per jam selama marathon. Salah satu pilihan praktis adalah gel energi yang mudah dikonsumsi ketika berlari.

Sementara itu, dalam panduan yang dimuat Runner's World, ahli diet olahraga Holley Samuel, RD, CSSD, menyebut asupan 60–90 gram karbohidrat per jam dapat menjadi sasaran bagi pelari yang mampu menoleransinya. Namun, kebutuhan tersebut tidak berlaku seragam untuk semua orang.

Samuel mengingatkan setiap pelari memiliki batas toleransi asupan yang berbeda. Jika jumlah karbohidrat terlalu banyak dan tidak dapat diserap tubuh dengan baik, risiko gangguan pencernaan justru meningkat.

Karena itu, asupan energi sebaiknya dibagi dalam beberapa kali konsumsi selama perlombaan. Pelari juga perlu menguji pola tersebut ketika latihan jarak jauh, (far,ist/dya)

Rumah Tua Terasa Angker, Ilmuwan Ungkap Faktanya



Rumah tua dengan lorong gelap, suara gemuruh dari ruang bawah tanah, dan pintu yang sesekali berderit kerap menghadirkan suasana mencekam. Sebagian orang bahkan mengaku merasakan kehadiran makhluk tak kasatmata ketika berada di bangunan semacam itu.

Namun, ilmuwan menemukan kemungkinan penjelasan lain yaitu gelombang suara berfrekuensi sangat rendah yang disebut infrasonik.Fenomena rumah angker memang tidak pernah kehilangan daya tarik. Popularitas cerita horor juga kembali terlihat melalui drama Korea terbaru Dead-End Job yang tayang di Netflix. Serial yang dibintangi Lee Jae-wook, Ko Min-si, dan Kim Min-ha tersebut mengangkat kisah pekerjaan misterius yang berubah menjadi pengalaman mengerikan. Di luar fiksi, para ilmuwan justru mencoba menjelaskan bagaimana lingkungan fisik dapat memunculkan sensasi ketakutan.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Behavioral Neuroscience pada 27 April 2026 menemukan bahwa paparan infrasonik berkaitan dengan peningkatan respons stres, rasa gelisah, dan perubahan suasana hati manusia. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa sebagian pengalaman yang dianggap sebagai tanda kehadiran hantu dapat dipengaruhi kondisi akustik suatu tempat.

Infrasonik merupakan gelombang suara dengan frekuensi di bawah 20 hertz (Hz), sehingga umumnya berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Meski tidak terdengar seperti suara biasa, gelombang tersebut berpotensi memengaruhi respons tubuh.

Penelitian ini melibatkan 36 peserta yang diminta mendengarkan musik menenangkan dan musik bernuansa mencekam. Sebagian peserta terpapar gelombang infrasonik sekitar 18 Hz yang diperdengarkan melalui pengeras suara khusus, sementara kelompok lainnya tidak mendapat paparan tersebut.

Hasilnya, peserta tidak mampu mengenali secara akurat kapan gelombang infrasonik diperdengarkan. Namun, kelompok yang terpapar menunjukkan peningkatan kadar kortisol dalam air liur. Kortisol merupakan hormon yang berkaitan dengan respons tubuh terhadap stres.Mereka juga melaporkan tingkat kejengkelan lebih tinggi, ketertarikan yang menurun, serta penilaian suasana musik yang lebih sedih. Menariknya, perubahan tersebut terjadi baik ketika peserta mendengarkan musik menenangkan maupun musik yang mencekam.

Getaran Pipa hingga Respons Stres

Lantas, dari mana gelombang infrasonik berasal? Dalam bangunan tua, sumbernya bisa berupa getaran pipa, sistem ventilasi, ketel pemanas, maupun instalasi mekanis lainnya. Getaran berfrekuensi rendah tersebut dapat merambat melalui struktur bangunan dan menghasilkan sensasi yang tidak selalu disadari penghuninya.

Namun, para peneliti tidak menyimpulkan bahwa seluruh rumah yang dianggap angker disebabkan infrasonik. Penelitian tersebut dilakukan dalam lingkungan eksperimen dengan jumlah peserta terbatas, bukan dengan mengukur gelombang suara di sejumlah rumah yang dikenal berhantu.

Temuan itu juga belum menjelaskan pengalaman melihat penampakan atau sosok tertentu. Karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah bangunan yang dianggap angker memang memiliki paparan infrasonik lebih tinggi dibandingkan bangunan biasa.

Penelitian ini setidaknya menunjukkan bahwa rasa takut tidak selalu muncul karena sesuatu yang terlihat atau terdengar secara langsung. Faktor lingkungan yang tidak disadari manusia pun dapat memengaruhi suasana hati dan respons tubuh.(far,ist/dya)

HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA,MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I SIDOARJO:** TEGUH A **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** AIS **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) **I MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. **I TRENGGALEK:** HERLAMBANG **I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN,FADHILA **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26,JL TENGGILIS TENGAH 4 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA TODAY

Tren Kimono Jacket, Padukan dengan Outfit Modern

Tren fashion 2026 kembali menghadirkan inspirasi busana tradisional Jepang dalam bentuk yang lebih modern. Salah satunya kimono jacket, luaran dengan potongan longgar, bagian depan menyilang atau terbuka, serta lengan lebar yang memberikan kesan anggun sekaligus santai.

Jika sebelumnya blazer menjadi pilihan utama untuk menciptakan tampilan rapi, kimono jacket menawarkan alternatif dengan karakter yang lebih fleksibel. Busana ini dapat dipadukan dengan jeans untuk aktivitas kasual hingga dress berbahan satin untuk menghadiri acara malam.

Majalah fashion Grazia USA menyoroti kemunculan kimono jacket sebagai salah satu tren outerwear musim gugur tahun ini. Potongan khas Jepang tersebut dinilai memberikan alternatif gaya yang lebih santai, tetapi tetap terlihat elegan.

Dari Busana Tradisional

Sebelum menjadi inspirasi busana modern, kimono memiliki perjalanan sejarah panjang dalam kebudayaan Jepang. Dalam bahasa Jepang, kimono ( ) secara harfiah berarti sesuatu yang dikenakan atau pakaian.

Lerkembangan kimono mendapat pengaruh dari pakaian tradisional Tiongkok yang dikenal sebagai hanfu. Pengaruh tersebut masuk ke Jepang sekitar abad ke-8 dan menjadi salah satu dasar perkembangan busana tradisional Jepang.

Pada periode Heian (794–1185), kimono berkembang menjadi busana yang semakin halus dan mewah, terutama di lingkungan bangsawan. Bahan sutra, sulaman rumit, serta penggunaan warna dan motif tertentu mencerminkan kedudukan sosial pemakainya.Warna dan motif bukan sekadar elemen dekoratif. Keduanya memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan status, musim, dan kehidupan masyarakat Jepang.

Memasuki periode pemerintahan samurai, gaya kimono mengalami penyesuaian. Jika kalangan bangsawan mengenakan busana dengan detail mewah, pakaian yang digunakan kalangan samurai cenderung lebih sederhana dan praktis untuk mendukung aktivitas mereka.

Perubahan besar kembali terjadi pada periode Edo (1603–1868). Stabilitas politik dan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan mendorong berkembangnya kelas menengah, termasuk pedagang dan perajin. Permintaan terhadap kimono meningkat sehingga industri tekstil berkembang pesat.

Berbagai motif, warna, dan teknik pewarnaan mulai dikenal luas. Kimono tidak lagi hanya menjadi pakaian kalangan elite, tetapi juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perkotaan.

Makna Warna dan Motif

Keistimewaan kimono tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada simbolisme warna dan motif yang digunakan.

Dalam tradisi Jepang, warna merah kerap dikaitkan dengan kebahagiaan, perayaan, dan keberuntungan. Sementara itu, putih memiliki hubungan dengan kemurnian dan awal yang baru.

Motif bunga sakura menjadi salah satu ornamen yang populer. Bunga ini melambangkan keindahan sekaligus kefanaan kehidupan karena hanya mekar dalam waktu singkat. Motif sakura sering diasosiasikan dengan musim semi di Jepang.Ada pula motif burung bangau atau tsuru yang melambangkan umur panjang dan keberuntungan. Sementara motif naga sering dikaitkan dengan kekuatan, perlindungan, dan kemakmuran.

Straight-Leg Jeans

Perpaduan kimono jacket dengan celana jeans berpotongan lurus menjadi pilihan paling mudah untuk aktivitas sehari-hari.Pilih kimono bermotif floral atau warna polos, kemudian padukan dengan kaus putih dan straight-leg jeans. Tambahkan loafers atau sneakers untuk memberikan kesan kasual yang tetap rapi.Kombinasi ini cocok untuk pergi ke kafe, berjalan-jalan, atau sekadar berkumpul bersama teman.

Celana Tailored

Ingin mengenakan kimono jacket untuk bekerja atau menghadiri pertemuan semi-formal? Padukan luaran ini dengan celana tailored berpotongan ramping untuk menciptakan kontras siluet yang elegan. Pilih outer berbahan linen, katun premium, atau material struktur tegas agar terkesan terlalu santai.

Untuk bagian dalam, gunakan atasan sederhana seperti kaus polos berpotongan bersih (clean-cut) atau manset rajut tipis sebagai inner. Sebagai sentuhan akhir, tambahkan ikat pinggang kulit minimalis untuk membentuk siluet pinggang, sehingga tampilan tetap terdefinisi rapi.

Perpaduan gaya ini menghadirkan alternatif pengganti blazer yang lebih segar dan dinamis, namun tetap memancarkan kesan profesional dan berkelas.**(far,ist/dya)**







Sadap Prabowo Sejak 2025, ...dari Hal 1

Penetapan tersangka diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menyebut penyadapan tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan internal kepolisian. Salah satu nomor telepon yang menjadi sasaran adalah milik Presiden Prabowo.

Kasus ini tidak berhenti pada persoalan siapa yang disadap. Penyidikan justru membuka pertanyaan lebih jauh mengenai penggunaan perangkat penyadapan milik Polri, pihak yang memerintahkan pemasukan nomor telepon ke sistem, serta nasib rekaman komunikasi yang telah dihimpun. Terlebih, penyidik mengungkap adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Hingga pengumuman penetapan tersangka, Polri belum membeberkan isi hasil sadapan maupun siapa saja yang sempat menerima atau mengakses informasi tersebut. Padahal, sasaran penyadapan disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

"Pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," kata Asep.

Menurut Asep, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa hubungan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki dasar undang-undang.

"Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi, kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," ujarnya.



Bareskrim Polri memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).ant

Bareskrim menyebut sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga diduga menjadi target. Namun, penyidik belum mengungkap daftar lengkap nomor yang disadap maupun identitas seluruh pemilik nomor tersebut.

Asep menjelaskan, dugaan penyadapan dilakukan dengan memasukkan nomor-nomor telepon ke sistem tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi. Dengan demikian, penggunaan perangkat penyadapan tersebut diduga tidak berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.

Perkara mulai terungkap setelah seorang petugas mengetahui adanya perintah penghapusan file hasil sadapan dari komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Petugas tersebut kemudian melaporkan peristiwa itu kepada kepolisian pada 30 Oktober 2026.

"Sementara 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," sambung dia. Inisial ini merujuk ke Irjen. Pol. Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi TIK Polri.

Penghapusan Jejak Sadapan

Penghapusan data menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi perkara yang disampaikan Bareskrim. Sebab, informasi yang dihimpun melalui penyadapan bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran prosedur, tetapi juga menyimpan jejak komunikasi dan aktivitas pengawasan terhadap sejumlah nomor telepon.

Menurut Asep, pada sekitar Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS. Penyidik menduga tindakan itu dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS tersebut. Selanjutnya pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," kata Asep.

Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 saksi dan tiga saksi ahli telah dimintai keterangan. Polisi juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.

Berdasarkan hasil penyidikan dan pendekatan scientific crime investigation, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Mereka disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lain berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Dalam konferensi pers tersebut, Asep menyatakan penyidikan masih berada pada tahap awal. Karena itu, kemungkinan pengembangan perkara dan pemeriksaan pihak lain masih terbuka.

Ketiga tersangka kini menjalani proses penanganan perkara di lingkungan Mabes Polri. Polri menyebut pemeriksaan dilakukan oleh Bareskrim bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), dengan pengawasan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo telah mengetahui dirinya menjadi sasaran penyadapan. Informasi tersebut, kata Yusril, telah disampaikan Kapolri kepada presiden.

"Apakah Presiden tahu? Sudah barang tentu karena dilaporkan Kapolri kepada beliau," kata Yusril di kantornya, Selasa (3/11/2026).

Namun, Yusril tidak menjelaskan lebih jauh mengenai modus penyadapan maupun informasi yang berhasil dihimpun. Ia meminta persoalan teknis tersebut dikonfirmasi langsung kepada Polri.

Ferdinand: Permulaan Makar

Penetapan Listyo Sigit dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai motif dan tujuan penyadapan terhadap kepala negara. Pengacara Ferdinand Hutahaean bahkan menilai perkara tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Ferdinand menyebut dugaan penyadapan terhadap Prabowo sebagai bagian dari upaya makar terhadap presiden maupun pemerintah. Ia meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

"Tadi saya mendengar konferensi persnya hanya menggunakan illegal access ya, padahal sebetulnya ini kan harus diselidiki lebih jauh," kata Ferdinand kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Ia kemudian menyampaikan penilaiannya mengenai kemungkinan motif di balik aktivitas tersebut.

"Saya melihatnya bahwa ini adalah adanya upaya perbuatan makar, makar kepada presiden maupun makar kepada pemerintah. Dan bagi saya, ini adalah permulaan perencanaan makar," ujarnya.

Ferdinand juga mempertanyakan apakah hasil penyadapan tersebut pernah digunakan atau diserahkan kepada pihak lain. Menurut dia, penyidik tidak boleh berhenti pada pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga menjalankan penyadapan.

"Apakah ada yang memanfaatkan informasi atau yang menerima informasi dari illegal tapping yang mereka lakukan? Itu kan harus diselidiki Polri. Jadi, jangan melihatnya hanya sebagai perbuatan biasa, illegal access biasa, ya. Illegal access terus mengenakan Undang-Undang ITE saja," kata Ferdinand.

Ia berharap Bareskrim mendalami tujuan penyadapan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berada di luar tiga tersangka dan ikut memanfaatkan informasi tersebu

"Saya berharap itu. Saya sarankan kepada Bareskrim, kepada Kapolri, untuk mendalami para tersangka lebih jauh. Apakah memang perbuatan mereka ini ditujukan untuk apa," tambahnya.

Pernyataan Ferdinand merupakan penilaian atas perkara tersebut. Hingga konferensi pers penetapan tersangka, Bareskrim belum menyatakan adanya tindak pidana makar dalam konstruksi perkara yang diumumkan. Penyidik masih menggunakan pasal terkait penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan informasi elektronik. (wid,rld,kcm,ant,kum/dya)

HARIAN LENTERA
Integrasi Perubahan

LAILA MUFIDAH SOROTI HALTE TAK LAYAK, MINTA PEMKOT LIBATKAN DUNIA USAHA

SURABAYA– Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membenahi fasilitas halte. Salah satunya dengan membuka peluang kerja sama melalui pihak ketiga untuk membangun dan mengelolanya.

Menurutnya, halte tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunggu angkutan umum, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan transportasi publik.

Laila menilai, sebagian besar halte di Surabaya belum memberikan kenyamanan yang memadai bagi masyarakat. Fasilitas pelindung dari panas dan hujan, tempat duduk, hingga papan informasi rute dan jadwal kedatangan kendaraan masih belum tersedia secara merata.

Beberapa halte yang dinilai cukup representatif berada di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Darmo, dan Kaliasin. Namun, di banyak lokasi lainnya, fasilitas pemberhentian angkutan umum masih sebatas bus stop sederhana. Bahkan, halte di seberang Kebun Binatang Surabaya (KBS) dinilai belum ideal untuk menunjang kenyamanan penumpang.

"Peneduh panas atau pelindung hujan nyaris sulit dinikmati di halte sebagian besar Surabaya. Ada beberapa memang cukup nyaman dan bagus," kata Laila, Selasa (3/11/2026).

Politisi perempuan PKB ini menuturkan, halte merupakan bagian penting dari ekosistem transportasi publik. Untuk itu, fasilitasnya harus mampu memberikan perlindungan sekaligus kenyamanan bagi masyarakat selama menunggu kendaraan.Selain tempat duduk dan atap pelindung, halte juga perlu dilengkapi informasi mengenai rute perjalanan, jadwal kedatangan bus, serta armada yang melayani setiap jalur. Keberadaan aplikasi Gobis, menurutnya, tidak lantas menggugurkan kebutuhan informasi di lokasi pemberhentian.

"Meski sudah ada aplikasi untuk angkutan publik di Surabaya (Gobis), informasi seputar jadwal kedatangan bus dan jalur harus ditampilkan di setiap halte," tuturnya.

Potensi Sumber Pendapatan

Di tengah kebutuhan pembenahan tersebut, Laila menawarkan skema kerja sama dengan dunia usaha. Ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membuka peluang bagi BUMN, perusahaan swasta, korporasi, maupun pihak lain untuk berinvestasi dalam pembangunan dan penataan halte.



Halte di depan Gedung Pandan Sari, Kandangan, Surabaya, kini sudah dilengkapi kursi. (Amanah/Lentera)

Menurutnya, halte memiliki nilai ekonomi karena menjadi ruang publik yang setiap hari dikunjungi calon penumpang. Dengan jumlah pengguna transportasi umum yang mencapai jutaan orang setiap tahun, halte berpotensi menjadi media promosi bagi berbagai produk dan perusahaan.

Laila mengusulkan agar halte dapat dimonetisasi melalui penamaan atau naming rights, pemasangan identitas merek, serta ruang iklan. Bahkan, pihak ketiga diberi kesempatan membangun halte secara utuh dengan desain sesuai identitas perusahaan, sepanjang memenuhi ketentuan tata ruang dan standar fasilitas yang ditetapkan pemerintah.

"Dishub harus menjual halte itu untuk menjadi langkah memonetisasi halte. Ada jutaan penumpang setiap tahun. Ini pasar potensial untuk iklan demi peningkatan brand produk apa pun," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar mekanisme kerja sama tidak dibebani prosedur birokrasi yang rumit. Kemudahan perizinan dan kejelasan skema kerja sama menjadi faktor penting untuk menarik minat dunia usaha.

"Saya mendorong dilakukan inovasi dalam pengembangan transportasi publik. Sudah saatnya jangan bergantung pada APBD dalam pembangunan fasilitas publik," ucap Laila.

Sejumlah halte di Surabaya telah menunjukkan adanya keterlibatan pihak ketiga, di antaranya Halte XL di kawasan Basuki Rahmat dan Halte Bank Jatim di Kaliasin. Model kolaborasi tersebut dinilai perlu diperluas agar semakin banyak halte yang mendapatkan dukungan pembiayaan dan penataan dari sektor swasta.

Skema serupa, lanjut Laila, juga dapat diterapkan pada armada transportasi publik. Suroboyo Bus maupun Wira Wiri dapat membuka ruang kerja sama periklanan melalui pemasangan identitas produk pada badan kendaraan.

"Dengan begitu, perusahaan memperoleh ruang promosi, sedangkan pemerintah mendapatkan tambahan sumber pendanaan untuk mendukung layanan transportasi," tambahnya.

Dorongan pembenahan halte semakin relevan seiring pengembangan layanan transportasi publik di Surabaya. Kehadiran Suroboyo Bus dan angkutan pengumpan Wira Wiri menjadi alternatif mobilitas masyarakat. Bahkan, Pemkot Surabaya telah menambah 18 unit armada minibus untuk memperluas jangkauan layanan Wira Wiri.

Berdasarkan data yang disampaikan Dishub Surabaya, armada transportasi umum di kota ini berjumlah 107 unit. Sementara itu, infrastruktur pemberhentian terdiri atas lebih dari 70 halte dan 838 bus stop.

Menurut Laila, penambahan armada harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Sebab, kualitas transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan, tetapi juga kenyamanan penumpang sejak berangkat, saat menunggu, hingga tiba di tujuan.

Meningkatnya jumlah pengguna Suroboyo Bus dan Wira Wiri juga menjadi peluang untuk memperkuat layanan sekaligus menarik keterlibatan sektor swasta. Karena itu, data jumlah penumpang dan titik pemberhentian perlu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menawarkan kerja sama kepada calon mitra.

"Harapannya, Pemkot tidak hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga memastikan halte dan bus stop memenuhi kebutuhan masyarakat," tutupnya. (Adv,Ama/Dya)

> "Saya mendorong dilakukan inovasi dalam pengembangan transportasi publik. Sudah saatnya jangan bergantung pada APBD dalam pembangunan fasilitas publik."
>
> **Laila Mufidah**
> **Wakil Ketua DPRD Surabaya**

